

BUKLET CERITA

Reformasi Penyaluran Tunjangan Guru: Upaya Pemerintah Menjamin Ketepatan Waktu

September 2025

Guru merupakan salah satu pilar utama dalam pendidikan nasional. Untuk mendukung kinerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka, pemerintah sejak lama menyediakan tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND). Tunjangan tersebut meliputi Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk guru bersertifikat pendidik, Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, serta Tambahan Penghasilan (Tamsil) untuk guru yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Namun dalam praktiknya, pencairan tunjangan ini sering kali menghadapi berbagai kendala. Banyak guru harus menunggu cukup lama hingga tunjangan benar-benar cair, bukan hanya hitungan hari atau minggu, melainkan hingga berbulan-bulan. Di salah satu kabupaten di Sumba, Provinsi NTT, misalnya, para guru di sekolah-sekolah terpencil mengeluhkan keterlambatan pencairan tunjangan profesi. Bahkan, setelah tunjangan cair, mereka masih mengalami potongan sekitar Rp1 juta per orang. Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tunjangan guru, terlebih bagi mereka yang bertugas di wilayah dengan akses yang penuh tantangan.

Masalah utama muncul karena mekanisme lama mewajibkan penyaluran melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setelah ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Alur ini sering memunculkan keterlambatan, baik karena prosedur administrasi maupun penggunaan sementara dana untuk keperluan lain oleh pemerintah daerah. Akibatnya, jadwal pencairan bervariasi di setiap daerah, jauh dari kepastian.



Bagi guru, keterlambatan ini tentunya sangat merugikan. Tunjangan profesi yang seharusnya mampu menambah penghasilan tidak dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Tidak sedikit guru yang terpaksa berutang maupun menunda kebutuhan keluarga dan pendidikan anak karena tunjangan yang terlambat disalurkan. Dampak psikologisnya pun cukup besar, karena menimbulkan rasa tidak dihargai dan menurunkan motivasi kerja pada para pendidik bangsa ini.

Regulasi Baru: Penyaluran Langsung dari Pusat

Melihat permasalahan tersebut, pemerintah pusat kemudian melakukan reformasi dalam mekanisme penyaluran tunjangan guru melalui penetapan KMK No. 8/KM.7/2025 tentang Penyaluran dan Pelaporan DAK Non-Fisik Dana Tunjangan Guru ASND. Mulai Maret 2025, dana Tunjangan Guru tidak lagi ditransfer ke Rekening Umum Daerah, melainkan langsung dari Rekening Umum Pusat ke rekening masing-masing guru penerima. Reformasi mekanisme ini diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 13 Maret 2025 sebagai langkah strategis percepatan pembangunan pendidikan. Hal ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah pada kesejahteraan guru dan perbaikan dunia pendidikan.



Langkah ini juga sejalan dengan upaya digitalisasi dan modernisasi sistem keuangan pemerintah. Dengan memanfaatkan data penerima yang valid serta sistem perbankan nasional, distribusi dana dapat berlangsung lebih cepat, aman, dan langsung kepada pihak yang berhak. Perubahan ini didasarkan pada sejumlah regulasi sebagai berikut:

- **Permendikdasmen Nomor 4 Tahun 2025**

Aturan ini memperbarui petunjuk teknis pemberian TPG, TKG, dan Tamsil, serta menegaskan bahwa pencairan dilakukan langsung dari pusat ke rekening guru.

- **KMK Nomor 8/KM.7/2025**

Regulasi ini menjadi payung hukum utama penyaluran dan pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tunjangan Guru ASN Daerah. Isinya jelas: tunjangan disalurkan melalui pemindahbukuan langsung dari kas negara ke rekening guru, berlaku sejak 28 Februari 2025.

- **KMK Nomor 62 Tahun 2025**

Aturan lanjutan yang mengatur integrasi pemotongan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 1% langsung di pusat sebelum tunjangan ditransfer ke guru. Mekanisme ini memastikan hak guru tetap cair tepat waktu, tanpa terbebani prosedur tambahan di daerah.

Dengan regulasi ini, pemerintah menetapkan jadwal pencairan tunjangan per triwulan: Maret, Juni, September, dan November. Pola ini membuat motivasi guru untuk kegiatan belajar-mengajar tetap terjaga dan memastikan pelayanan pendidikan bagi siswa berkualitas.

Sampai dengan Agustus 2025, tunjangan guru telah disalurkan kepada lebih dari **1,5 juta guru** di Indonesia dengan nilai total sebesar **Rp 34,4 triliun**.

Dampak Positif

Dampak nyata kebijakan baru ini sudah dirasakan. Guru kini menerima tunjangan secara tepat waktu, langsung ke rekening, tanpa harus menunggu proses panjang di daerah. Kepastian finansial ini membantu mereka dapat mengatur kebutuhan rumah tangga, membiayai pendidikan anak, dan mengurangi tekanan ekonomi. Lebih dari itu, motivasi kerja meningkat. Guru merasa dihargai karena hak mereka dipenuhi tepat waktu. Dari sisi administratif, beban guru juga berkurang—tidak ada lagi kebutuhan menanyakan status pencairan ke dinas, cukup memantau rekening pribadi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa guru di seluruh Indonesia menyambut baik kebijakan ini.

“Kita mendapatkan apresiasi karena para guru benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Ini bukti negara hadir,” ujarnya. Data Kementerian Keuangan mencatat, pada Triwulan I 2025 pemerintah berhasil menyalurkan **Rp16,71 triliun** untuk **1,44 juta guru** di seluruh Indonesia tepat waktu.

Selain bagi guru, kebijakan ini juga membawa keuntungan strategis bagi pemerintah pusat.

1

Transparansi meningkat karena dana tidak lagi “tertahan” di kas daerah. Potensi penyalahgunaan berkurang drastis, dan setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai peruntukan.

2

Pengawasan lebih mudah dilakukan. Data penyaluran dapat dipantau secara real-time, sehingga evaluasi dan perbaikan bisa dilakukan cepat.

3

Keberhasilan kebijakan ini memperkuat citra pemerintah sebagai pihak yang serius meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini juga menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Selain dampak positif bagi guru, perubahan mekanisme ini juga berimplikasi positif terhadap tata kelola (*governance*). Pajak dari tunjangan guru masuk ke rekening negara menjadi lebih cepat karena pemotongan pajak dilakukan saat penyaluran tunjangan guru. Sebelumnya, penyetoran uang pajak oleh Pemda biasanya dilakukan di akhir tahun anggaran. Prakiraan penerimaan pajak menjadi lebih akurat. Terdapat Rp 3,2 triliun pajak yang tercatat dari tunjangan guru per Agustus 2025. Demikian juga pada jaminan kesehatan guru dimana iuran BPJS langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat, sehingga tidak ada lagi iuran yang tertunda. Kesehatan guru menjadi lebih terjamin. Tidak ada guru yang mendapatkan penolakan pelayanan kesehatan karena penunggakan pembayaran iuran.

Tantangan dan Kolaborasi

Meski demikian, kebijakan ini tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang paling krusial adalah validitas data penerima. Agar tunjangan benar-benar sampai ke rekening yang tepat, data guru harus mutakhir, mulai dari status kepegawaian hingga nomor rekening yang aktif. Kesalahan kecil dapat berakibat pada salah transfer atau dana yang tidak dapat dicairkan.

Untuk itu, koordinasi lintas kementerian sangat penting:

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan validasi data guru penerima, Kementerian Keuangan mengeksekusi penyaluran, dan pemerintah daerah tetap berperan memperbarui data guru. Edukasi juga diberikan kepada guru agar aktif memperbarui data pribadi mereka.

Perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru dari Rekening Umum Negara langsung ke rekening guru adalah langkah strategis yang patut diapresiasi. Kebijakan ini bukan hanya menyelesaikan persoalan keterlambatan penyaluran, tetapi juga memperkuat sistem keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

SKALA, Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Akselerasi Layanan Dasar, ikut berkontribusi dengan memberi masukan teknis pada desain mekanisme transfer, bekerja sama dengan pemerintah pusat maupun daerah. Kehadiran mitra pembangunan ini memperkuat desain kebijakan agar lebih efektif di lapangan. Perubahan mekanisme penyaluran tunjangan guru merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Kebijakan penyaluran langsung tidak hanya mengatasi masalah keterlambatan klasik, tetapi juga menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Jika konsistensi kebijakan ini terjaga, manfaatnya akan semakin besar. Guru lebih sejahtera dan termotivasi, siswa lebih terlayani, dan kualitas pendidikan nasional semakin meningkat. Bahkan, prinsip penyaluran langsung dan tepat sasaran ini bisa menjadi model bagi program layanan dasar lainnya. Dengan dukungan semua pihak, kebijakan ini dapat berjalan lancar, sehingga guru semakin sejahtera, murid semakin terlayani dengan baik, dan kualitas pendidikan Indonesia semakin meningkat.



SKALA
Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar
Kemitraan Australia - Indonesia

Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) adalah Program Kemitraan Australia-Indonesia untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dengan meningkatkan penyediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan di daerah tertinggal.

KONTAK KAMI



IFC Tower 2, Level 17
Jl. Jendral Sudirman Kav. 22-23
Jakarta 12920



communications@skala.or.id



<https://s.id/Channel-SKALA>



[SKALA.or.id](https://skala.or.id)